

POLITIK MUSLIMAT NU DAN FATAYAT NU JAWA TIMUR DALAM MENDUKUNG KONTESTASI CAPRES-CAWAPRES 2024

Wasid¹, Rochimah²

UIN Sunan Ampel Surabaya

¹wasid@uinsa.ac.id, ²rochimah@uinsa.ac.id

Abstract: This study explores the political social actions of the elite Muslimat NU and Fatayat NU in East Java in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential elections. The elite of Muslimat NU and Fatayat NU generally share the same culture as they both stem from the NU culture. However, in their political social actions, each has its own uniqueness. This uniqueness will be discussed; starting from the differences in choices and their reasons to the issues of the typology of their actions in supporting certain choices. This research is part of qualitative research. Therefore, the author uses Weberian social action theory related to the motives behind social actions, as social actions are subjectively oriented towards goals and hopes, namely the hopes of Muslimat NU and Fatayat NU. The results of this study state that Muslimat NU and Fatayat NU in East Java have different choices in responding to the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections, considering that their motives for support are also different. This difference is part of the internal dynamics so that their socio-political actions are typologized into cultural pragmatism and structural pragmatism.

Keywords: Muslimat NU, Fatayat NU, Social Action, East Java.

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi tindakan sosial politik elite Muslimat NU dan Fatayat NU Jawa Timur dalam Konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Elite Muslimat NU dan Fatayat NU secara umum memiliki kultur yang sama sebab sama-sama lahir dari kultur NU. Tapi, dalam tindakan sosial politik pilihan keduanya memiliki keunikan. Keunikan ini yang akan diulas; mulai perbedaan pilihan dan alasannya hingga persoalan tipologi tindakannya mendukung pilihan tertentu. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori tindakan sosial ala Weberian terkait dengan motif dibalik tindakan sosial sebab tindakan sosial secara subyektif berorientasi pada tujuan dan harapan, yakni harapan Muslimat NU dan Fatayat NU. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Muslimat NU dan Fatayat NU Jawa Timur memiliki pilihan yang berbeda dalam menanggapi kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, mengingat bahwa motif dukungan mereka juga berbeda. Perbedaan ini adalah bagian dari dinamika internal sehingga tindakan sosial politiknya tertipologikan menjadi pragmatis kultural dan pragmatis struktural.

Kata Kunci: Muslimat NU, Fatayat NU, Tindakan Sosial, Jawa Timur

Received ; 15 Agustus 2025; Accepted ; 15 September 2025; Published ; 17 September 2025



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 19 No.2 September 2025

DOI: 10.56997/almabsut.v19i2.2452

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Membicarakan hubungan perempuan dalam ranah politik memang tidak ada habisnya, antara pro dan kontra. Pasalnya, ruang politik adalah ruang bebas yang bisa melibatkan siapapun, baik perempuan maupun laki-laki sebab Islam secara substantif memperhatikan betul kualitas seseorang, bukan mengukur hanya pada perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, termasuk kualitas keterlibatan dalam ruang politik. Artinya, nilai-nilai yang memuat unsur diskriminatif yang mengebiri kontribusi perempuan dalam ruang politik bertentangan dengan Islam itu sendiri.⁸⁰⁷ Bukan hanya itu, undang-undang dasar 1945, khususnya pada pasal 281 (2) melarang keras segala bentuk tindakan yang mengarah pada upaya diskriminatif kepada siapapun dan dilakukan oleh siapapun.

Urgensi membincang relasi perempuan dan politik tidak lain bertujuan dalam rangka bagaimana perlunya mengawal secara kontinyu nilai-nilai partisipatif yang berkeadilan dalam setiap pesta demokrasi yang selalu melibatkan unsur perempuan. Banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan ini, baik berbicara tentang gagasan kaitan pro dan kontro perempuan dalam politik hingga persoalan pengalaman peran perempuan dalam konteks pemilu, termasuk sejauh mana politisi perempuan itu, benar-benar mengawal isu-isu yang berkaitan dengan perempuan itu sendiri. Sebut saja misalnya tulisan Wahidah Zein Br Siregar⁸⁰⁸, Anifatul Kiftiyahini⁸⁰⁹, Pudji Astuti dkk⁸¹⁰, Susi Dian Rahayu dkk⁸¹¹, dan lain-lain.

Termasuk dalam kajian ini adalah keterlibatan perempuan dalam menentukan kepemimpinan bangsa tahun 2024, yakni dalam kontestasi Capres dan Cawapres 2025, dengan segala dinamika politik yang dihadapi dalam bingkai proses demokrasi di Indonesia, khususnya dilihat dari keterlibatan Muslimat NU dan Fatayat NU sebagai pendukung dan sekaligus masuk menjadi tim sukses. Pelibatan perempuan memang secara riil tidak bisa dilihat sebelah mata oleh para peserta kontestan, khususnya Capres dan Cawapres, apalagi tidak ada keterwakilan perempuan yang sengaja dipasang oleh partai politik, baik sebagai Capres atau Cawapres. Itu artinya, di satu sisi parpol juga tetap harus berpikir realistis dan pragmatis dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi kontestan dalam setiap pemilu, apalagi pemilu Cawapres dan Cawapres. Sementara di sisi yang berbeda keberadaan suara perempuan juga sangat strategis sebagai pendulang suara.

Fakta yang cukup menarik, bahwa suara perempuan itu penting adalah menangnya Khofifah Indar Parawansa dalam pilihan Gubernur di Jawa Timur. Mengingat, terpilihnya Khofifah menjadi catatan tersendiri bagi politik santri yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Timur yang dikenal sebagai daerah santri dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Kemenangan Khofifah tidak bisa dilepas dari Muslimat NU, apalagi posisinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PB Muslimat NU. Di samping karena memang sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dengan aktif di partai politik dan keluar dari partai politik.

Kehadiran Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur sejak terpilih pertama tahun 2019 memberikan tanda positif betapa keterlibatan perempuan dalam politik, tidak sekedar pencari suara, tapi juga menjadi kontestan. Selain Khofifah, bertendeng dengan nama-nama perempuan lain di level kabupaten/kota yang sukses terpilih dengan suara terbanyak dengan berkontestasi dengan calon lain dari kaum laki-laki, misalnya Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Puput Tantiyana Sari (Bupati Probolinggo), Farida (Bupati Jember), Haryanti Sutrisno (Bupati Kediri), Dewanti Rumpoko (Walikota Batu), Rukmini Buchori (Walikota

⁸⁰⁷ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Yuridis* 6 (2019): 55.

⁸⁰⁸ Wahidah Zein Br Siregar, "Perjuangan Dan Peran Perempuan Di DPRD Jawa Timur 2004-2009," *Journal.Unair.Ac.Id/FilerPDF/02-Wahidah.Pdf*, 2023.

⁸⁰⁹ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Yuridis* 6 (2019): 55-72.

⁸¹⁰ Pudji Astuti Dkk, "Kajian Peran Dan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur," *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 13 (2019): 184-95.

⁸¹¹ Susi Dian Rahayu, "Gender and Development (GAD): Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur," *Adhyasta Pemilu* 1 (2018): 85-99.

Probolinggo), Munjidah Wahab (Bupati Jombang), Ita Puspitasari (Walikota Mojokerto), dan Anna Mu'awanah (Bupati Bojonegoro).

Iniilah yang digambarkan oleh Siti Musdah Mulia dalam menggambarkan kepemimpinan perempuan yang sukses sebagai berikut:

"Pengalaman perempuan membuktikan bahwa kunci keberhasilan perempuan dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang yang bisa diandalkan. Artinya, mampu memberi perintah yang jelas dan mau menindaklanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi keakuratan, menjaga integritas pribadi dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, tetap dituntut untuk bisa bekerjasama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat."⁸¹²

Untuk itu, kontestasi kepemimpinan bangsa tahun 2024 tidak bisa lepas dari keterlibatan perempuan, khususnya dalam konteks pemilihan Capres dan Cawapres. Berdasarkan keputusan KPU, Capres dan Cawapres telah disepakati ada tiga pasangan, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomer urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomer urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan nomer urut 3. Persaingan nampaknya, ketika penelitian ini ditulis, terus memanaskan bukan hanya di media sosial, tapi juga di dunia nyata, termasuk merebut suara di Jawa Timur.

Panasnya persaingan ini, secara sosiologis, dipengaruhi oleh berubahnya koalisi antar parpol yang terjadi dalam pemilu 2024 dengan yang terjadi pada 2019. Sebut saja misalnya, PKB dan Nasdem yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar harus keluar dari kesepakatan selama 10 tahun dalam bingkai koalisi sejak presiden Jokowi dilantik pertama kali dan kedua kalinya menjadi presiden. Belum lagi, hubungan koalisi PKB dan Nasdem dengan partai-partai lain yang selama 10 tahun adem ayem, sekarang harus berlawanan dengan mengusung pasangan yang lain, baik berada pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kerasnya kontestasi ini berimplikasi pada perebutan suara di kantong-kantong daerah yang pemilihnya tinggi, khususnya Jawa. Secara khususnya Jawa Timur menjadi perebutan ketat para Capres dan Cawapres, mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap Jawa Timur berdasar putusan KPU sebesar 31.402.833, sebuah jumlah yang tidak sedikit sehingga kemenangan di Jawa Timur berpotensi menjadi pertanda kemenangan di level nasional. Jawa Timur, secara khusus menjadi unik sebagaimana disebutkan sebelumnya sebab dipimpin oleh kepala daerah perempuan, termasuk adanya tokoh-tokoh kunci perempuan yang memiliki jaringan luas di tengah masyarakat dan perempuan yang menjadi pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur, termasuk di dalamnya adanyak komunitas perempuan yang aktif di Muslimat NU dan Fatayat NU.

Apapun alasannya pelibatan elite perempuan adalah keniscayaan, jika para tim sukses sadar dan mampu mengkalkulasi betul akan kondisi Jawa Timur yang sangat kompleks. Elite perempuan dalam konteks penelitian ini adalah mereka-mereka yang terlibat aktif dalam organisasi Muslimat NU atau Fatayat NU Jawa Timur dengan segala karakternya yang berbeda sesuai dengan perbedaan umur. Pasalnya, berdasarkan fakta setiap momentum politik di Jawa Timur suara perempuan sangat menentukan, walau dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 keterlibatan mereka beragam dan menyebar ke semua pasangan calon.

Oleh karenanya, secara sosiologis, elite perempuan __baik dari kalangan Muslimat NU atau Fatayat NU__ dalam melihat kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden sangatlah dinamis, untuk tidak mengatakan tidak tunggal. Artinya, elite perempuan dari Muslimat Nu dan Fatayat NU menjadi tim sukses berada di semua pasangan, walau sebagian

⁸¹² Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Pertama (Yogyakarta: Kibar Press, 2008). 255.

elite lebih memilih ke pasangan tertentu dengan secara tegas. Pastinya, ada argumentasi yang mendasari pilihan itu sehingga setiap elite melakukan dukungan agar yang didukung menang dalam kontestasi pemilu 2024. Di samping yang berbeda, tidak adanya arahan dari pimpinan organisasi juga memastikan anggotanya di setiap daerah bebas melakukan pilihan sesuai dengan kepentingan dan makna dukungan terhadap pasangan calon Capres dan Cawapres, apalagi mereka yang mendapat arahan langsung dari pimpinan tertinggi organisasi, walau dilakukan dengan cara tidak struktural.

Berdasar latar belakang ini, kajian ini dirancang untuk mengupas kaitan keterlibatan elite perempuan NU sebagai tim sukses dari kalangan Muslimat NU atau Fatayat NU. Pilihan elite perempuan NU untuk mengarahkan dukungan kepada calon Capres dan Cawapres tertentu tidak tanpa alasan, mengingat mereka bukan sekedar sebagai individu, tapi juga menggambarkan keterwakilan organisasi yang embannya dengan ribuan atau bahkan juta kader yang menyebar di berbagai daerah. Belum lagi, calon Capres dan Cawapres tidak ada yang mewakili dari unsur perempuan sehingga dapat dipastikan para kontestan juga menjual isu-isu perempuan.

MASALAH

Mempertimbangkan hal-hal penting dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah penelitian ini. Pertama, Apa yang melatar belakangi Muslimat NU dan Fatayat NU di Jawa Timur menjadi tim sukses dari Capres-Cawapres tahun 2024?., Kedua, Bagaimana tipologi tindakan sosial elite Muslimat NU dan Fatayat NU di Jawa Timur sebagai tim sukses dalam mengawal kemenangan Capres-Cawapres tahun 2024 pilihannya?

METODE

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian kualitatif sebab berkaitan dengan tindakan sosial elite perempuan NU sebagai tim sukses dalam kontestasi kepemimpinan bangsa, tepatnya pada pilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 yang dipraktikkan oleh Muslimat NU dan Fatayat NU. Artinya, dari bahasan pokoknya penelitian ini akan mengupas tindakan sosial Muslimat NU dan Fatayat NU yang terlibat sebagai tim sukses dalam dukung mendukung Capres-Cawapres tertentu, sekaligus tipologi apa yang ditimbulkan dari tindakan yang dimaksud.

Untuk tujuan itu, peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam rangka menemukan sumber yang dibutuhkan, mulai pada tahapan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi atau pengamatan peran serta (*participant observation*), catatan lapangan (*fieldnotes*) dan dokumentasi.⁸¹³ Semua langkah-langkah berproses saling melengkapi, sepanjang memiliki hubungan faktual sebagai bahan untuk menjawab pokok-pokok bahasan dalam bahasan ini. Sesekali, data yang sudah diperoleh dilakukan pengulangan untuk memastikan tindakan sosial Muslimat NU dan Fatayat NU sebagai tim sukses itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yakni bahwa elite perempuan dari kalangan Muslimat NU dan Fatayat NU sebagai tim sukses itu berbeda-beda pilihan dan juga berbeda motif serta tujuan. Langkah ini, bagian dari proses *triangulasi*.

Konkritnya, peneliti melakukan wawancara dengan elite Muslimat NU dan Fatayat NU Jawa Timur, jika memang dimungkinkan, khususnya yang tercatat sebagai tim sukses pasangan Capres-Cawapres. Elite perempuan yang dimaksud adalah kaum perempuan yang terlibat aktif dalam organisasi Muslimat NU dan Fatayat NU di Wilayah Jawa Timur. Jika tidak perlu wawancara, maka penulis mengumpulkan data dari berbagai media sosial resmi, jika dianggap cukup sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis sosiologisnya menggunakan teori Tindakan Sosial Weberian, yang salah satu inti pemikirannya bahwa setiap tindakan

⁸¹³ Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, XI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

sosial secara subyektif berorientasi pada tujuan dan harapan⁸¹⁴, yang dalam hal ini adalah harapan dari para elite Muslimat NU dan Fatayat NU terlibat dalam dukung mendukung Capres-Cawapres. Di samping itu, analisis datanya menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana digunakan peneliti untuk membaca data-data yang dikumpulkan dengan cara kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan pengumpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).⁸¹⁵

PEMBAHASAN

Berdasar pada data-data yang ditemukan, berikut hasil dari bahasan penelitian ini:

1. Perempuan dalam Jebakan Demokrasi

Sepanjang pemerintahan itu terbentuk secara demokratis, maka yang diterapkan menganut sistem demokrasi Pancasila, dimana dalam praktiknya bahwa demokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dengan semangat berkelindan dengan nilai-nilai Pancasila.⁸¹⁶ Karenanya, pelibatan semua elemen anak bangsa dalam mengawal sistem demokrasi menjadi keniscayaan sebab demokrasi tidak mengenal asal usul orang, termasuk jenis kelamin. Jadi pelibatan perempuan dalam setiap kontestasi politik sebagai pilihan berdemokrasi adalah proses rasional yang harus dijaga semua pihak, termasuk kaitan keterlibatan elite perempuan dari kalangan Muslima NU dan Fatayat NU dalam kontestasi pilihan Capres dan Cawapres 2024.⁸¹⁷

Dalam konteks pilihan Capres dan Cawapres 2024 keterlibatan elite perempuan NU memiliki tanggung jawab agar kiranya proses demokrasi berjalan dengan baik, walau pilihan itu akhirnya berbeda-beda. Sebut saja, misalnya berdasar fakta riil politik, dukungan elite Fatayat NU Jawa Timur dengan menggunakan nama Elemen Jaringan Perempuan Nahdliyin terhadap pasangan Anies dan Muhaimin (AMIN) tidak lain dengan pertimbangan dalam rangka mengawal hubungan kultural yang sangat kuat dengan ideologi Aswaja, apalagi Muhaimin, selaku calon Wakil Presiden masih tercatat sebagai keluarga besar dari KH. Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU.

Kesamaan kultural ideologis ini yang kemudian, Dewi Winarti sebagai koordinator JPN, sekaligus menjabat Ketua Fatayat NU, sebagaimana disebutkan memiliki tugas untuk meyakinkan masyarakat pemilih agar memilih pasangan AMIN, khususnya dari kalangan nahdliyin perempuan. Apalagi perlu diingat, JPN ini adalah elemen taktis yang menyatukan kader Fatayat, Muslimat, IPPNU dan para majelis Ta'lim Se Jawa Timur untuk mengantarkan kemenangan pasangan AMIN dalam kontestasi Capres dan Cawapres. Dengan begitu, motive ideologi calon di satu sisi, dan kesamaan dalam partai di sisi yang berbeda, memastikan JPN memiliki cara pandang tersendiri dalam menitipkan keadaban demokrasi kepada Capres dan Cawapres pasangan AMIN dengan taglinenya "Indonesia Adil Makmur untuk Semuanya".⁸¹⁸⁸¹⁹

Sementara itu, para pendukung pasangan Prabowo dan Gibran semakin menarik sebab mendapat dukungan secara total Elite Muslimat NU. Dukungan dan beragam peran

⁸¹⁴ Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD," *Annur; Jurnal Studi Islam* 13 (2021): 137-52.

⁸¹⁵ Huberman dan Saldana Miles, *Qualitative Data Analysis* (Amerika: SAGE Publications, 2014). 12-13.

⁸¹⁶ Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Konstitusi* 10, Nomor (2023): 337.

⁸¹⁷ Proses rasionalisasi ini secara yuridis memastikan peran perempuan memiliki kesamaan dengan yang lain dalam setiap momentum politik sebagaimana dikenal dengan kebijakan afirmasi yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2013 kaitan dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ini, maka peran dan keterwakilan perempuan menjadi sangat penting dalam setiap momentum politik. Rozki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, (2029). 110-111.

⁸¹⁸ Kumparan Editor, "Menangkan AMIN Di Berbagai Daerah, JPN Jatim Akan Fokus Di Pemilih Perempuan," *Kumparan.Com*, 2024.

⁸¹⁹ Editor.Tirto, "Isi Lengkap Visi Misi Anies-Cak Imin Di Pilpres 2024," *Tirto.Id*, 2024.

yang mereka lakukan cukup unik, bukan saja deklarasi tapi menjadi penyambung lidah gagasan dari tim sukses sukses Nasional. Artinya, dalam konteks demokrasi apa yang dilakukan para elite perempuan NU tetap konsisten _walau pilihannya berbeda-beda_ dalam upaya agar para calon pemilih harus ikut terlibat memilih, untuk tidak mengatakan tidak golput, mengingat golput _sekalipun hak setiap orang tidak pernah menyelesaikan masalah.

Keunikan ini dapat dilihat dari upaya dukungan Muslimat NU yang dilakukan para elitnya se-Jawa Timur dengan menggunakan forum-forum organisasi, di satu sisi melakukan konsolidasi organisasi dan di sisi yang berbeda bagaimana menyebarkan virus-virus dukungan agar keluarga besar Muslimat NU mengikuti arahan dari Ketumnya, yakni Khofifah Indar Parawansa. Dengan masuknya Khofifah sebagai Tim Kampanye Nasional (TKN)⁸²⁰ memastikan peta perolehan suara akan mengerucut, khususnya suara Muslimat NU akan lebih memilih pasangan Prabowo dan Gibran. Kharisma Khofifah sangat kuat di lingkungan Muslimat, apalagi dalam beberapa dekade masih menjabat Ketua Umum sehingga kekuatan kulturalnya sangat kuat. Belum lagi, posisinya sebagai Gubernur yang masih aktif menjabat, kecuali bila masa-masa kampanye dilakukan.

Apa yang dilakukan Muslimat NU, menurut penulis, masih dalam memantapkan keadaban proses-proses berdemokrasi dengan pertimbangan kesadaran mereka untuk terlibat aktif dalam momentum politik kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Artinya, semakin banyak perempuan calon pemilih itu bergerak mensukseskan pemilu menunjukkan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dengan kepesertaan yang memilih sesuai dengan harapan dan kesadaran sebagai calon pemilih. Sungguh ironis, bila kemudian kontestasi politik yang menjadi ciri khas dari sistem demokrasi, pada akhirnya harus lemah ketika para calon pemilih lebih memilih menjadi Golongan Putih (golput).

Dari paparan ini menunjukkan, pertama, semua dukungan yang dilakukan elite perempuan NU, baik dari Muslimat NU atau Fatayat NU, menggambarkan tentang pentingnya proses berdemokrasi dengan penuh keadaban. Hal ini setidaknya dapat diukur dari proses keterlibatan perempuan, baik sebagai tim kampanye atau memang terlibat aktif untuk memilih sesuai hati nurani mereka dalam melihat pasangan masing-masing. Artinya, secara prosedural bahwa pesta demokrasi yang semakin banyak melibatkan perempuan menunjukkan semakin banyak kesadaran mereka dalam politik sebab keterlibatan mereka menunjukkan juga ada harapan kebaikan yang diinginkan bagi semua Capres dan Cawapres, khususnya bagi kepentingan perempuan.

Rekam jejak memang selama ini masih menjadi ukuran dalam memaknai proses keadaban demokrasi sehingga para elite perempuan NU menyatakan dinyatakan dengan dukungan. Di samping itu, memang ada pertimbangan hubungan emosional partai tertentu atau organisasi tertentu dengan Capres dan Cawapres kaitan dengan para pemilih di Jawa Timur, khususnya yang berhubungan dengan suara Nahdliyin. Pasalnya, kedekatan emosional disinyalir ikut menjadi pemantik dukungan, misalnya banyak kader-kader Fatayat NU atau Muslimat NU yang mengarahkan dukungan kepada Muhaimin disebabkan keNUannya sudah di atas rata-rata dibandingkan calon yang lain, walau harus diakui memiliki kelemahan. Tidak salah kemudian, muncul anggapan lebih baik memilih calon yang benar-benar memiliki irisan dengan NU.

Dari sini bisa dipahami, kontestasi para pendukung pasangan Capres dan Cawapres dari kalangan elite perempuan NU memberikan dampak yang signifikan, bukan saja dalam proses pemenangan calon tertentu dalam menyedut suara dari kalangan Nahdliyin, tapi menambah kualitas dan kuantitas proses demokrasi, setidaknya diukur dengan pelibatan

⁸²⁰ Posisi Khofifah mendukung Prabowo mendapat posisi yang penting sehingga ia menjadi dewan pengarah dari Tim Kampanye Nasional (TKN). Lihat: Editor Detik, "5 Hal Soal Khofifah All Out Dukung Prabowo-Gibran Di Pilpres 2024," *Detik.Com*, 2024.

masyarakat dalam menentukan pilihan bukan malah diam atau memilih golput, yang kurang memberikan apresiasi dalam pembumian nilai-nilai demokrasi.

Namun, yang harus diakui bahwa salah satu fenomena pesta demokrasi yang kemudian menjadi sebab para pendukung Capres dan Cawapres selalu terlibat adalah adanya dukungan itu berkelindan dalam tarikan pragmatisme dan idealisme. Pada konteks budaya ini, dapat dipastikan tidak sedikit biaya yang dibutuhkan oleh para kontestan untuk membiayai proses perebutan suara. Bukan hanya uang tunai yang dibuat transaksi, bisa jadi kepentingan yang ditransaksikannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni para kontestan dan para calon pemilih⁸²¹, Kondisi ini juga dialami oleh elite Muslimat NU dan Fatayat NU, mengingat dukungan mereka kepada pasangan tertentu memiliki alasan; mulai alasan idealis hingga alasan pragmatis untuk kepentingan diri sendiri atas kelompok

Kondisi ini hampir terjadi di semua daerah di Jawa Timur yang suaranya diperebutkan oleh tiga pasangan Capres dan Cawapres sekaligus. Sebut saja, misalnya dukungan Elite perempuan NU dari Fatayat NU Jawa Timur _walau tidak bersifat organisatoris instruktif_ terhadap pasangan Amin bila dilihat perannya juga tidak datang tanpa alasan, apalagi masih menjabat sebagai elite Fatayat NU Jatim. Memang Jaringan Perempuan Nahdliyyin (JPN) sengaja dibuat sebagai mesin politik dengan menempatkan elite Fatayat Jatim sebagai koordinator juga sangat beralasan, mengingat dengan cara ini organisasi tidak tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek. Bukan hanya itu, kharisma elite fatayat NU yang mengomandani proses pemenangan pasangan Amin sangat dipertimbangan dalam konteks kaitan politik transaksional. Inilah yang kemudian ada pragmatisme politik kaitan pelibatan ini, apalagi elite fatayat yang terlibat juga masih berafiliasi dengan salah satu partai pendukung pasangan Amin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa.

Walaupun begitu, alasan idealis kaitan dukungan elite Fatayat NU tidak bisa diabaikan. Misalnya, dukungannya kepada Amin disebabkan karena pertimbangan kultur KeNUan Muhaimin Iskandar, yang dalam hal ini sebagai calon Cawapres. Pertimbangan ke-NUan ini penting dalam konteks politik masa depan dan memilih pasangan Amin ada trust bahwa masa dengan negara akan tetap terjamin mengawal visi kebangsaan dan keislaman *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Pada konteks yang berbeda juga demikian, dukungan elite Muslimat NU Jawa Timur dengan patuh pada arahan Ketua Umumnya, yakni Khofifah Indar Parawansa, tidak datang begitu saja tanpa ada alasan pemantik dukungan. Dukungan mereka berkelindan lebih sangat kentara kepentingan pragmatismenya, dari pada kepentingan idealisme dengan menempatkan dukungan sebagai sarana untuk menipiskan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Sebut saja, dukungan Khofifah yang diikuti secara masif oleh elite Muslimat NU dan anggota Muslim Cabang se Jatim- kepada pasangan Prabowo dan Gibran memiliki hubungan berkelanjutan dengan posisi Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, mengingat masa jabatannya sudah berakhir pada tahun 2024.

Menariknya, pilihan Khofifah mendukung pasangan Prabowo dan Gibran tidak lepas dari garansi partai politik yang mendukungnya untuk memberikan rekomendasi bahwa ia layak kembali memimpin Jawa Timur dalam kontestasi Pilkada 2024, khususnya Gerindra, PAN dan Demokrat.⁸²² Gayung sambut, tawaran yang sangat pragmatis ini sulit ditolak, apalagi secara kekuatan Khofifah sangat membutuhkan rekomendasi atau semacam SK

⁸²¹ Satrio Pringgo Sejati Dkk, "Politik Transaksional Dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern," *Journal of Sharia* 03, Nomor (2024): 71.

⁸²² Editor Tribunjatim, "Inilah Salah Satu Alasan Khofifah Yang Disampaikan Dalam Berbagai Media. Lihat Alasan Khofifah Masuk Ke Tim Dan Dukung Prabowo-Gibran, Mulai Resmi Tancap Gas Di Bulan Januari - Tribunjatim.Com (Tribunnews.Com). Dikutip 20 Agustus 2024," *Tribunnews.Com*, 2024.

yang memastikan Ia maju pada kontestasi Pilkada 2024, mengingat Khofifah juga tidak menjadi bagian dari parpol tertentu.

Inilah yang menurut penulis, Khofifah sangat realistis-pragmatis melihat kekuatan pada kontestasi Pilkada 2024 membutuhkan dukungan dari partai pendukung sehingga dukungan terhadap pasangan ini. Mengingat, apapun kekuatannya dan kepercayaan masyarakat terhadapnya selama menjadi Gubernur pada periode pertama di Jawa Timur, tetap saja partai pengusung adalah modal absah bertarung kembali merebut jabatan Gubernur periode kedua. Kesadaran ini yang mendorong Khofifah menjatuhkan pilihan, mengingat insting politiknya sangat kuat, apalagi ada sinyal pemerintah juga mendukung.

Sementara itu, dukungan Muslimat NU Jawa Timur mengawal keputusan ketumnya juga tidak bisa dilepaskan dari alasan tersebut, apalagi Khofifah adalah salah satu kader terbaik. Dengan begitu, hubungan sesama kader Muslimat memberikan dampak emosional tersendiri untuk tetap mengikuti arahan elite tertinggi kepemimpinan Muslimat yang mendukung penuh pada pasangan Prabowo dan Gibran. Memang dalam berorganisasi menjaga hubungan antara pusat, wilayah dan Cabang adalah salah satu dari langkah konkrit untuk tetap bersama-sama dalam semua kebijakan, termasuk apa yang dilakukan Muslimat NU di Jawa Timur merupakan bagian dari menyamakan persepsi dalam menyikapi politik kekinian dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, termasuk saatnya bertarung kembali pada pilihan daerah, yakni gubernur Jawa Timur.

Menariknya, secara struktural Fatayat NU dan Muslimat NU memiliki penyikapan yang berbeda-beda dalam mendukung Capres dan Cawapres 2024. Ini terjadi tidak lepas dari elite Ketua Umumnya dalam menyikapi dukung mendukung. Artinya, elite ketua umum yang terang-terangan mendukung pasangan tertentu, sebagaimana dilakukan oleh Ketua Umum Muslimat dalam mendukung pasangan Prabowo dan Gibran, berpotensi akan diikuti oleh elite Muslimat NU pada level wilayah dan Cabang-cabang se Jatim, apalagi jika dikaitkan dengan pragmatisme dukungan pada pilihan Gubernur Jatim pada era berikutnya. Sebaliknya, elite Ketua Umumnya yang tidak mau terjebak pada dukung-mendukung dengan pertimbangan mengikuti arahan PBNU secara organisatoris, maka sangat dimungkinkan elite pada tingkatan Wilayah dan Cabang akan lebih leluasa bersikap.

Sebut saja, misalnya, PC Fatayat NU Sumenep sangat tegas menyatakan, bahwa secara organisatoris tidak diperkenankan siapapun dari kader Fatayat NU yang mendukung pasangan tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 untuk membawa organisasi dalam dukung mendukung. Ini terjadi, setelah ada salah satu elitnya yang mendukung pasangan tertentu, menegaskan sebagai dukungan Fatayat NU, bukan berangkat secara individu. Padahal, elite Fatayat NU Jatim jelas-jelas mendukung pasangan Amin.

Inilah dinamika yang terjadi di lapangan kaitan sikap elite perempuan NU – khususnya dari Muslimat NU dan Fatayat NU, ketika terlibat dalam dukung mendukung Capres dan Cawapres 2024. Intinya, perbedaan pilihan dari mereka lahir dari sikap dan nurani pilihannya masing-masing, walau tetap berkelindan dengan kepentingan politik di balik dukung-mendukung tersebut. Apapun perbedaan itu terjadi, elite Muslimat NU dan Fatayat NU Jawa Timur berada dalam kesadaran politik yang tinggi, apalagi suaranya cukup besar di Jawa Timur.

2. Tipologi Peran Elite Perempuan NU

Dari paparan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan bahwa Muslim NU dan Fatayat NU, walau terlahir dari kultur yang sama, keduanya memiliki perbedaan peran dalam memastikan ikut terlibat sebagai tim sukses dukung mendukung Capres dan Cawapres 2024. Perbedaan peran ini muncul dari soal cara pandang di antara mereka yang berbeda dalam melihat Capres dan Cawapres di satu sisi, sementara di sisi yang berbeda juga berkaitan

dengan kepentingan organisasi bisa mengambil peran apa, baik yang bersifat pragmatis maupun idealis.

Fatayat NU dan Muslimat NU Jawa Timur memiliki karakter yang berbeda di sebabkan yang satu masih terkategori pemuda, sementara yang lain (Muslimat) tergolong para ibu-ibu nahdliyin dengan karakteristiknya yang mudah dikonsolidasikan dan gaya politiknya cukup kuat menggunakan model patron kepada pimpinan tertinggi, yakni dalam hal ini patronasinya terhadap keputusan Ketua Umumnya dalam menyikapi pilih. Sehingga jangan terjadi konflik di internal. Patronase ini yang kemudian, pilihan Muslimat NU lebih mudah dikondisikan dalam satu suara, ketika pimpinan organisasi tertingginya telah menentukan pilihan untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran.

Realitas ini juga tidak lepas dari sikap PBNU yang dari awal lebih memilih bersikap netral, bahkan sikap PBNU tegas akan memberhentikan sementara bagi pengurus harian bila benar-benar nyata mendukung pasangan tertentu. Dengan begitu, Muslimat NU dan Fatayat NU disinyalir memiliki sikap yang berbeda, ketika pimpinan masing-masing bertindak berbeda dalam menyikapi pernyataan PBNU, seperti sikap elite PB Fatayat NU yang lebih memberikan kebebasan berproses bagi kader-kadernya untuk menentukan pilihan pada kontestasi Capres dan Cawapres. Berbeda dengan elite Muslimat NU _dalam hal ini sikap ketua Umumnya-- sangat tegas memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran, sambil menggerakkan potensi struktural-kultural NU di berbagai PW dan PC Muslimat NU, termasuk Muslimat NU Jawa Timur.

Oleh karena itu, berdasar pada fakta-fakta yang telah ditemukan, maka penulis menemukan dua tipologi peran elite perempuan NU _dari Muslimat NU dan Fatayat NU_ dalam mendukung proses kemenangan dari pasangan Capres dan Cawapres 2024. Pertama, pragmatisme kultural. Pragmatism model ini merupakan bentuk kepentingan terselubung dari dukung mendukung yang dilakukan oleh elite perempuan NU, baik elite Muslimat NU atau Fatayat NU, tanpa menggunakan roda organisasi sebagai motor gerakan mendukung pasangan tertentu.

Pragmatisme politik mengandaikan sebuah kontrak politik yang dilakukan dengan tim pemenang pasangan Capres dan Cawapres tertentu, yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dibalik tindakan dukung mendukung kepada pasangan tertentu. Sebut saja misalnya, elite Fatayat NU Jawa Timur tidak menggunakan logika struktural Fatayat NU untuk mendukung pasangan Anis dan Muhaminin Iskandar. Elite Fatayat NU Jawa Timur yang mendukung pasangan Anis dan Muhaminin Iskandar ditegaskan oleh ketuanya Dewi Winarti dengan lebih memilih membentuk Jaringan Perempuan Nahdliyin (JPN) _dengan dengan tegas menggunakan struktur Fatayat NU_ dengan harapan keterlibatan Fatayat NU tidak bisa divonis langsung secara organisatoris larut dalam politik praktis.

Apapun tindakan yang dilakukan, sikap elite Fatayat NU Jawa Timur dengan bergerak melalui JPN adalah bagian dari bagaimana ia menggunakan kekuatan kultural untuk menarik simpati dukungan masyarakat, bukan hanya kader-kader Fatayat NU. Karenanya, tidak salah bila kemudian di beberapa daerah elite kader-kader Fatayat NU memiliki sikap yang tidak sama dengan pilihan di level wilayah. Inilah resiko pragmatisme kultural yang tidak mampu mengikat kader di seluruh Jawa Timur dalam satu pilihan Capres dan Cawapres, walau pragmatisme politik masih berkelindan dalam semua person-person tim sukses, terkhusus dalam konteks isu-isu perempuan.

Sementara tipologi kedua adalah pragmatis struktural. Maksudnya, pragmatis politik model ini melibatkan elite perempuan NU dalam dukung mendukung pilihan Capres dan Cawapres 2024. Pragmatis model ini dilakukan oleh kelompok struktur NU, yaitu mereka yang masih aktif sebagai elite elite NU, termasuk di Banom-banom NU seperti Fatayat NU dan Muslimat NU. Kelompok ini memiliki jaringan yang kuat dari pusat, wilayah, cabang, anak cabang dan ranting. Bukan hanya itu, jaringan struktural ini yang kemudian sengaja

dipakai secara pragmatis untuk mensukseskan mimpi-mimpi politik elite yang berkelindan dibalik sebagai tim sukses pasangan tertentu.

Dalam konteks dukung mendukung Capres dan Cawapres tahun 2024, menurut penulis Muslimat NU lebih vulgar __dibandingkan Fatayat NU__ dalam menentukan sikap politiknya. Lebih vulgar disebabkan semuanya elite Muslimat NU; mulai dari PB, Wilayah hingga cabang dengan secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Pilihan tegas ini tidak datang tiba-tiba sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tapi berkaitan dengan kepentingan politik jangka pendek dari kader-kader Muslimat NU yang terlibat dalam kontestasi politik, khususnya dalam konteks pilihan Gubernur Jatim yang melibatkan kader terbaik Muslimat NU, yakni Khofifah Indar Parawansa yang juga masih menjabat Ketua Umum Muslimat NU.

Fakta-fakta sosiologis kaitan dengan ini sangat jelas, bahkan semakin nampak ketika pasangan Prabowo dan Gibran akhirnya benar-benar dinyatakan sebagai pemenang dalam kontestasi Capres dan Cawapres 2024. Sebagai konsekwensinya, Khofifah Indar Parawansa, walau tidak memiliki partai politik, ia dengan mudah memperoleh dukungan maksimal dari partai politik, khususnya dari partai politik yang sejak awal mendukung kemenangan Prabowo dan Gibran, seperti Partai Golkar Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Namun dua tipologi, yakni tipologi pragmatis kultural dan pragmatis struktural, memang muncul dari pilihan politik, sekaligus alasan dari pilihan itu. Artinya, pilihan mendukung pada pasangan tertentu, tidak sekedar memilih tanpa alasan yang mendorongnya. Ada alasan, sekaligus ada harapan baru yang diinginkan dari pasangan Capres dan Cawapres, baik dari Muslimat NU atau Fatayat NU, Berpijak dari penjelasan ini, maka perbedaan dukungan elite perempuan NU ini juga tidak bisa dipisahkan dengan harapan baru yang ingin dicapai dari mereka, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

Harapan baru yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan gagasan ideal dari visi dan misi yang disampaikan oleh Capres dan Capres 2024 kaitannya bangunan ideal dalam menyikapi isu-isu perempuan sebagai bahan kampanye, sekaligus sebagai janji politik di hadapan calon pemilih. Tidak sedikit dari visi dan misi ini kemudian calon pemilih ikut memiliki pertimbangan dukungan kepada pasangan sesuai dengan hati nuraninya. Bila diamati dari soal visi dan misi yang disampaikan dan ditemukan dalam berbagai naskah akademik, maka isu-isu perempuan menjadi perbincangan serius oleh para Capres dan Cawapres. Sebut saja, pasangan Anies dan Muhaimin dengan membawa tagline visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" dengan misinya "delapan Jalan Perubahan. Pasangan ini menawarkan gagasan agar kiranya akses partisipasi perempuan dalam bekerja perlu ditingkatkan, misalnya kenaikan persentase minimal perempuan yang berpartisipasi untuk mengikuti setiap rekrutmen TNI dan Polri, termasuk partisipasi karya dalam politik luar negeri.

Di samping itu, pasangan ini berkomitmen memperhatikan secara serius kaitannya dengan pemenuhan hak secara adil bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi kodratnya seperti cuti hamil dan melahirkan. Isu ini penting menjadi perhatian sebab seringkali perempuan kurang mendapat perlakuan secara adil kaitannya dengan persoalan cuti, mengingat perempuan juga tidak sama dengan laki-laki. Cuti adalah sarana jeda waktu sehingga perempuan bila libur untuk sementara waktu sampai kelahiran anak.⁸²³

Sama dan berbeda dengan pasangan Anies dan Muhaimin, pasangan Prabowo dan Gibran juga sama memandang bahwa isu-isu yang berkaitan dengan perempuan menjadi perhatian dalam setiap kampanyenya. Pasangan ini, memang berbeda dalam merespon isu-

⁸²³ Penjelasan ini dikutip dalam: Editor.nu.or.id, "Penjelasan Ini Dikutip Dalam Visi Misi Tiga Capres-Cawapres Tentang Hak Perempuan Dan Anak," *NU.or.Id*, 2024.

isu tersebut dengan berkomitmen pada lahirnya proses perlindungan kepada perempuan secara menyeluruh dengan hadirnya kebijakan yang tidak mengandung diskriminasi gender dalam semua proses-proses pembangunan, termasuk memberikan perlindungan kepada tumbuh kembangnya anak-anak dan memberikan gizi yang cukup.

Jadi, orientasi pasangan Prabowo dan Gibran dalam merespon isu-isu perempuan lebih banyak menggunakan instrumen kekuasaan agar mampu menghadirkan kebijakan inklusif dalam bingkai perspektif gender sehingga prioritas pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi target seutuhnya. Jadi, problem selama ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial atau kurang adilnya hak kepada perempuan tidak lain karena kekuasaan kurang responsif melahirkan kebijakan yang memberikan ruang yang adil bagi perempuan.⁸²⁴

Sementara itu, pasangan Ganjar dan Mahfud sama menjadikan isu-isu perempuan sebagai isu penting yang perlu direspon dan dicarikan solusinya. Pasangan ini berkomitmen pada upaya mensejahterakan perempuan dan anak. Sebagai implementasi dari komitmen ini, pasangan ini membuat program yang disebut dengan Kartini Maju, yakni program yang memberikan jaminan dalam rumah tangga kepada laki-laki agar dapat memperkuat posisi dan dukungan kepada perempuan di semua lini kehidupan. Selain itu, ada program jaga teman, yakni kegiatan yang bertujuan menjamin perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan kaitan dengan gender.

Produktivitas perempuan juga menjadi perhatian Ganjar dan Mahfud dalam semua sektor informal dan formal. Produktifitas ini penting agar kiranya posisi perempuan memiliki semangat dan target yang dalam dunia pekerjaan. Karenanya, pasangan ini akan fokus pada ketersediaan Penitipan Anak di berbagai tempat agar perempuan yang bekerja tetap bisa bekerja dengan lebih baik, tidak terpicirkan oleh problem dengan problem penitipan anak. Tawaran Ganjar dan Mahfud masuk akal Masa-masa pertumbuhan anak memang dibutuhkan pengawal pengasuhan yang intens, sementara perempuan yang produktif harus segera menyesuaikan diri dengan dengan mencari penggantinya sebagaimana banyak terjadi di perkotaan.

Bila dianalisis kaitan dengan visi dan misi para Capres dan Cawapres, nampaknya sangat jelas bahwa semuanya memiliki respon yang serius dalam menempatkan isu-isu perempuan sebagai salah satu isu prioritas dalam kampanye mereka untuk merancang kepemimpinan ke depan, jika pada akhirnya terpilih. Cara ini sangat realistis, mengingat suara perempuan sangat besar dalam menentukan pemenang dalam kontestasi Cawapres dan Capres 2024. Fakta ini tidak berlebihan, apalagi provinsi Jawa Timur dengan suara perempuannya yang cukup besar, dan di setiap stakeholder memiliki cara tersendiri dari tim kampanye untuk mengajak mereka agar terlibat dalam kemenangan, walau sekedar terlibat memilih pasangan Capres dan Cawapres yang telah ditentukan.

Kaitan dengan visi dan misi dari para kontestan Capres dan Cawapres 2024 dapat dipahami kaitan dengan sikap elite perempuan NU. Pertama elite perempuan NU berbeda-beda secara sosiologis. Maksudnya, perbedaan pilihan antar mereka dalam menyikapi kontestasi Capres dan Cawapres 2024 tidak bisa dilepaskan dari hubungan kultural dengan partai pendukung di satu sisi dan hubungan emosional disisinya yang berbeda sebab mereka memahami bahwa semua pasangan juga sama-sama memperhatikan isu-isu perempuan.

Maksudnya, hubungan kultural elite perempuan NU yang berbeda-beda melahirkan pilihan yang berbeda, misalnya kedekatan elite Fatayat NU dengan PKB, yang notabennya sebagai pengurung Anies dan Muhaimin, memastikan putusannya berbeda __walau tetap tidak membawa unsur keorganisasian__ dengan elite perempuan NU dari unsur Muslimat yang lebih terpatron pada pilihan politik ketua umumnya. Atau perbedaan pilihan para Bu

⁸²⁴ Beritasatu Editor, "Visi Dan Misi Capres-Cawapres Untuk Perempuan Serta Anak, Prabowo-Gibran Janjikan Kesetaraan Gender," *Beritasatu.Com*, 2024.

Nyai dan Ning yang menyebar ke semua pasangan dengan peran yang berbeda-beda disebabkan karenanya hubungan emosional semata, bukan murni karena gagasan dari visi dan misi kaitannya dengan perempuan.

Oleh karena itu, inilah yang unik dari keterlibatan dan peran elite perempuan NU dalam mendukung pasangan kontestan Capres dan Cawapres tahun 2024. Harapan dari mereka pasti ada keperpihakan dalam mengawal isu-isu keperempuanan, tapi perbedaan fokus para kontestan tidak mendasari alasan pokok perbedaan itu muncul, tapi lebih didasari pada faktor lain, misalnya patron dukungan dengan organisasi di atasnya atau karena kedekatan emosional dengan partai pendukung.

Bukan hanya faktor sosiologis semata, Kedua, elite perempuan NU terlibat mendukung pasangan Capres dan Cawapres lebih pada keyakinan harapannya bisa disalurkan kepada calon tertentu, walau harapan yang dimaksud sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan visi dan misi dari para kontestasi. Idealisme demokrasi seringkali tidak nyambung dengan praktik politik di lapangan sebab faktanya sangat dinamis, bahkan tidak sedikit ada problem lemahnya literasi yang bisa menyambungkan para calon pemilih menguliti semua visi dan misi para kontestan, yang hasil dijadikan pertimbangan ideal untuk mendukung atau memilih calon tertentu.

Akibat dari model ini, elite perempuan NU akhirnya hanya menjadi corong kampanye dari tim sukses semua pasangan kontestan dalam rangka meyakinkan calon pemilih dari komunitasnya masing-masing untuk memilih pasangan tertentu. Tidak ada penilaian yang lebih rasional dan terbuka dalam rangka mencerdaskan calon pemilih yang diajak, kecuali pokoknya memilih mengikuti motif yang mendorongnya. Motif ini bisa jadi kepentingan jangka pendek sebagaimana nampak jelas dari keterlibatan Khofifah Indar Parawansa yang menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional, padahal ia tercatat sebagai elite tertinggi dalam kepemimpinan Muslimat NU secara nasional.

Dari uraian ini, nampak jelas bahwa peran yang dilakukan oleh elite perempuan NU dalam dukung mendukung memang lebih dekat dengan praktik demokrasi prosedural dari pada substansial. Tidak ada proses partisipasi serius yang melibatkan elite perempuan NU dalam mendiskusikan program-program yang dicanangkan oleh para kontestan Capres dan Cawapres. Artinya, dalam konteks dukungan elite perempuan NU di wilayah Jawa Timur tidak ada rumusan yang jelas kaitannya dengan isu-isu perempuan yang diharapkan dalam kepemimpinan bangsa ke depan.

Harapan baru adalah salah satu keinginan dari semua pihak dalam setiap kontestasi lima tahunan Capres dan Cawapres, terlebih dari perspektif elite perempuan NU yang menjadi bahasan penelitian ini. Tapi, tarikan pragmatism politik seringkali memotong kompas idealisme yang ada dalam proses-proses berpolitik sehingga nilai-nilai demokrasi yang semestinya memiliki harapan baru bagi perubahan nilai bagi perempuan, tetap saja dalam konteks keperpihakan elite perempuan NU pada kontestasi capres dan cawapres tidak akan memberikan dampak yang signifikan.

Artinya, para elite perempuan NU selama ini masih hanya bergerak sebagai pengumpul suara, belum pada pendobrak tawar menawar keberpihakan sebagaimana diharapkan bagi kepentingan mereka, ketika dukung mendukung itu dilakukan kepada pasangan tertentu dari tiga kontestan. Mengutip perkataan elite Muslimat NU Jawa Timur bahwa pilihan kita kepada pasangan Prabowo atau Gibran yang disampaikan dalam forum-forum yang melibatkan anggota Muslimat lebih dikarenakan mengikuti arahan politik dari ketua umumnya, yakni Khofifah Indar Parawansa. Belum lagi sikap elite Fatayat NU dengan organisasi barunya bahwa dukungan kepada pasangan Anies dan Muhaimin lebih karena melihat rekam jejak keduanya, termasuk dukungan para Bu Nyai dan Ning yang sebagian menjatuhkan pilihan kepada pasangan Ganjar dan Mahfud.

Inilah fakta-fakta sosiologis yang menyertai proses dukung-mendukung elite perempuan NU dari Muslimat NU dan Fatayat NU dalam kontestasi pilihan Capres dan

Cawapres 2024. Apapun itu sebagai fakta menjadi kenyataan, sekaligus menggambarkan betapa rumitnya menjaga jarak antara idealisme politik kaitannya mengawal isu-isu perempuan sebagai daya tawar dukung-mendukung dengan pragmatism politik yang bersifat jangka pendek, bahkan tidak jarang tidak ada hubungannya secara konkrit dengan keperpihakan kepada perempuan dalam rasa keadilan dalam ruang sosial dan dunia kerja lainnya.

Akhirnya, presiden baru adalah harapan baru mungkin itulah yang menjadi harapan semua pemilih. Tapi, jika yang diharapkan adalah keberpihakan kepada perempuan, maka harapan baru dapat dipastikan mengikuti apa yang disampaikan pada visi dan misi para kontestan dalam setiap kampanyenya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sayangnya, visi dan misi itu tidak menjadi landasan pokok dalam persetujuan dukungan, yang lebih banyak menjadi landasan adalah kepentingan jangka pendek; mulai jaminan dukungan politik personal seperti Pilkada 2024 atau kepentingan sesaat yang tidak berkelanjutan hingga terpilihnya presiden baru. Kondisi ini yang terjadi ditengah keterlibatan elite-elite perempuan NU dari kalangan Muslimat NU dan Fatayat NU.

PENUTUP

Dari bahasan yang telah disebutkan, penulis memberikan dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama, tindakan sosial dari Muslimat NU dan Fatayat NU Jawa Timur dengan aktif sebagai tim sukses dari pasangan tertentu kaitan kontestasi pemilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 memiliki perbedaan sesuai dengan tujuan dan harapannya, ketika mendukung pasangan tertentu. Fatayat NU Jatim lebih memberikan keleluasan kepada Kadernya untuk mendukung pasangan tertentu, sementara Muslimat lebih tegas melakukan dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran sehingga memudahkan untuk menyatukan suara.

Sementara kedua, tipologi tindakan sosial dari proses dukung mendukung yang dilakukan oleh Muslimat NU dan Fatayat NU mengarah kepada pragmatisme kultural dan pragmatisme struktural. Artinya, elite Fatayat NU yang mendukung pasangan Amin adalah potret dari pragmatisme kultural sebab tidak menggunakan organisasi Fatayat NU secara langsung. Berbeda dengan Muslimat NU yang terkategori dalam pragmatisme struktural sebab dukungan yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan institusi keorganisasi dari Muslimat NU. Pastinya, tipologi ini lahir dari perbedaan cara pandang, sekaligus perbedaan harapan kaitan dengan Capres dan Cawapres berdialektika dengan isu-isu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia," *Yuridis* 6 (2019): 55.
- Arikunto, Suhartini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. XI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Detik, Editor. "5 Hal Soal Khofifah All Out Dukung Prabowo-Gibran Di Pilpres 2024." *Detik.Com*, 2024.
- Dkk, Pudji Astuti. "Kajian Peran Dan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 13 (2019): 184-95.
- Dkk, Satrio Pringgo Sejati. "Politik Transaksional Dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern." *Journal of Sharia* 03, Nomor (2024): 71.
- Editor.Detik.Com. "Muslimat nu-Jatim-Deklarasi-Dukung-Prabowo-Gibran-Di-Pilpres." *Detik.Com*, 2024.
- Editor.jawapos.com. "Dinonaktifkan-Sebagai-Ketum-Muslimat-Nu-Usai-Nyatakan-Dukungprabowo-Gibran-Khofifah-Ya-Aturannya-Begitu." *Jawapos.Com*, 2024.
- Editor.nu.or.id. "Penjelasan Ini Dikutip Dalam Visi Misi Tiga Capres-Cawapres Tentang Hak Perempuan Dan Anak." *NU.or.Id*, 2024.

- Editor.Tirto. "Isi Lengkap Visi Misi Anies-Cak Imin Di Pilpres 2024." *Tirto.Id*, 2024.
- Editor, Beritasatu. "Visi Dan Misi Capres-Cawapres Untuk Perempuan Serta Anak, Prabowo-Gibran Janjikan Kesetaraan Gender." *Beritasatu.Com*, 2024.
- Editor, Kumparan. "'Menangkan AMIN Di Berbagai Daerah, JPN Jatim Akan Fokus Di Pemilihan Perempuan.'" *Kumparan.Com*, 2024.
- Liputan6, Editor. "Ribuan Santriwati, Nyai Dan Ning Di Jatim Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024." *Liputan6.Com*, 2024.
- Miles, Huberman dan Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Amerika: SAGE Publications, 2014.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*. Pertama. Yogyakarta: Kibar Press, 2008.
- Noviati, Cora Elly. "'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.'" *Konstitusi* 10, Nomor (2023): 337.
- Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *Annur; Jurnal Studi Islam* 13 (2021): 137-52.
- Rahayu, Susi Dian. "'Gender And Development (GAD): Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur.'" *Adhyasta Pemilu* 1 No. 2 (2018): 85-99.
- Roisah, Rozki Priandi dan Kholis. "'Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.'" *Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, (2029).
- Siregar, Wahidah Zein Br. "Perjuangan Dan Peran Perempuan Di DPRD Jawa Timur 2004-2009." *Journal.Unair.Ac.Id/FilerPDF/02-Wahidah.Pdf*, 2023.
- Tribunjatim, Editor. "Inilah Salah Satu Alasan Khofifah Yang Disampaikan Dalam Berbagai Media. Lihat Alasan Khofifah Masuk Ke Tim Dan Dukung Prabowo-Gibran, Mulai Resmi Tancap Gas Di Bulan Januari - Tribunjatim.Com (Tribunnews.Com). Dikutip 20 Agustus 2024." *Tribunnews.Com*, 2024.